

# ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021-2023

A. Muhammad Fayi Farhan

NPP. 32.0841

Asdaf Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Program Keuangan Publik

Email: [32.0841@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0841@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Dr. Anindita Primastuti, SE., ME

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** *Problem Statement/Background (GAP): Regional financial performance is a key indicator in evaluating the success of regional autonomy implementation. However, during the 2021–2023 fiscal years, the financial performance of the Palu City Government still demonstrated a high fiscal dependency on central government transfers, with an average fiscal decentralization ratio of only 23.6%. Although the effectiveness of local revenue (PAD) was categorized as very effective (107.13%), its contribution to total regional revenue remained insignificant. This indicates that Palu City's fiscal independence has not been fully achieved. This study aims to address the literature gap regarding comprehensive financial performance analysis, especially in developing regions like Palu City.* **Purpose:** *This study aims to analyze the financial performance of the Palu City Government in the fiscal years 2021–2023. Method:* *This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. The analysis of regional financial performance is based on four main financial ratios proposed by Mahmudi (2019). Results:* *The findings indicate that the financial performance of Palu City is still relatively low in supporting regional autonomy. This is due to suboptimal utilization of local revenue potential, limited human resources in financial management, and low public awareness regarding tax and levy payments. Although PAD realization exceeded its target, the revenue structure is still heavily dominated by transfer funds. The Palu City Government has made several efforts, such as employee training, public service reform, and strengthening of local-owned enterprises (BUMD) to improve local income. Conclusion:* *he city of Palu's financial performance is considered low, requiring fiscal capacity strengthening through optimizing local potential and improving regional financial management efficiency. A comprehensive and sustainable approach is key to enhancing regional fiscal independence.*

**Keywords:** *Financial Performance, Local Revenue (PAD), Fiscal Decentralization*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Namun, Pemerintah Kota Palu selama tahun anggaran 2021–2023 masih menunjukkan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer pusat, dengan rasio derajat desentralisasi fiskal yang rendah, yaitu hanya sebesar 23,6%. Meskipun efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong sangat efektif (107,13%), kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih belum signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kota Palu belum optimal. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan literatur terkait analisis kinerja keuangan daerah yang komprehensif, khususnya di wilayah berkembang seperti Kota Palu. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu tahun 2021-2023. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis kinerja keuangan dilakukan melalui empat rasio keuangan daerah menurut Mahmudi (2019). **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja

keuangan Kota Palu masih tergolong rendah dalam mendukung otonomi daerah. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penggalan potensi PAD, rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Meskipun capaian PAD telah melebihi target, dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan masih sangat tinggi. Pemerintah Kota Palu telah melakukan berbagai upaya seperti pelatihan pegawai, reformasi pelayanan publik, serta strategi penguatan BUMD untuk meningkatkan pendapatan. **Kesimpulan:** Kinerja keuangan di kota palu masih tergolong rendah, maka dari itu diperlukan penguatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi potensi lokal dan peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Pendapatan Asli Daerah, Desentralisasi Fiskal

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah. Implementasi otonomi daerah memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan daerah dengan efisien, namun juga menuntut pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat melalui pelaporan realisasi APBD.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menekankan pentingnya efisiensi dalam alokasi sumber daya dan pemerataan pelayanan publik. Selain itu, berbagai peraturan seperti Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2019 mengatur pengelolaan keuangan daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator keberhasilan otonomi daerah. Dalam konteks ini, pengukuran kinerja keuangan daerah melalui analisis rasio, seperti rasio efektivitas PAD, rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi, dan rasio ketergantungan, menjadi penting untuk mengetahui kapasitas fiskal dan efektivitas tata kelola keuangan daerah. Menurut Martinez-Vazquez dan Boex (2001), rasio keuangan daerah dapat dijadikan indikator strategis dalam menilai efektivitas desentralisasi fiskal. Sementara itu, Smoke (2015) menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat tergantung pada kapasitas kelembagaan dan fiskal di tingkat lokal. Selain itu, Faguet (2014) menekankan pentingnya tata kelola keuangan lokal yang kuat sebagai prasyarat agar desentralisasi mampu mendorong peningkatan kinerja pembangunan. Selain itu, Rodríguez-Pose dan Ezcurra (2010) menemukan bahwa tanpa pemerataan kapasitas fiskal antar daerah, desentralisasi justru dapat memperburuk ketimpangan dan menghambat efektivitas pembangunan ekonomi lokal.

Namun, di Kota Palu pada tahun anggaran 2021-2023, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih berada di bawah 25%, dengan rata-rata hanya sebesar 23,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum berhasil mengoptimalkan potensi PAD, sehingga masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan data, PAD Kota Palu masih didominasi oleh sektor pajak daerah, sedangkan sektor lain seperti retribusi dan hasil pengelolaan aset menunjukkan kontribusi yang fluktuatif. Meski ada peningkatan kontribusi PAD pada tahun 2022, penurunan terjadi kembali pada tahun 2023, yang mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam menggali potensi pendapatan daerah.

Kinerja keuangan Kota Palu juga dapat dievaluasi melalui indikator rasio keuangan, seperti

rasio derajat desentralisasi fiskal yang hanya mencapai rata-rata 23,6% dan rasio kemandirian sebesar 31,6%. Kedua rasio ini menunjukkan bahwa Kota Palu masih berada dalam kategori rendah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sebaliknya, rasio ketergantungan keuangan daerah yang mencapai 74,5% menegaskan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer. Meskipun rasio efektivitas PAD cukup tinggi, yaitu 107,13%, hal ini lebih mencerminkan rendahnya target PAD daripada tingginya realisasi pendapatan.

Situasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kurang optimalnya upaya pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, seperti peningkatan kompetensi pegawai, optimalisasi potensi lokal, dan inovasi dalam sistem pemungutan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu tahun 2021-2023, guna memberikan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kinerja keuangan pemerintah daerah telah menjadi topik kajian yang luas dalam berbagai penelitian sebelumnya, baik dari segi efektivitas, efisiensi, maupun aspek kemandirian fiskal. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut cenderung bersifat kuantitatif dan hanya menekankan pada evaluasi teknis terhadap indikator-indikator keuangan secara parsial, seperti kontribusi PAD terhadap pendapatan atau tingkat efisiensi belanja. Pendekatan semacam ini belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas permasalahan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah secara kontekstual, khususnya di daerah berkembang seperti Kota Palu.

Penelitian terdahulu juga banyak berfokus pada daerah-daerah besar dengan kapasitas fiskal tinggi, sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan dan dinamika keuangan daerah yang memiliki potensi PAD terbatas dan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer. Di sisi lain, Kota Palu merupakan salah satu daerah yang setiap tahunnya menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, namun secara substansi masih menghadapi hambatan serius dalam mewujudkan kemandirian keuangan. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian administratif dengan kinerja fiskal yang sesungguhnya.

Lebih lanjut, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis empat rasio utama keuangan daerah secara bersamaan yakni efektivitas PAD, derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan, dan ketergantungan fiskal dalam satu kerangka evaluatif yang utuh. Selain itu, aspek-aspek penyebab lemahnya kinerja keuangan seperti kualitas sumber daya manusia, perencanaan keuangan yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, masih kurang mendapatkan perhatian dalam penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu secara komprehensif berdasarkan data tahun 2021-2023. Pendekatan ini tidak hanya menyajikan angka rasio keuangan, tetapi juga mengeksplorasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kinerja fiskal secara mendalam, serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemandirian dan efektivitas keuangan daerah.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks Analisis

Keuangan daerah.

Penelitian pertama oleh Rizkiza Aurin (2023) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019–2021” menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Jambi masih bergantung pada pemerintah pusat, dengan rasio derajat desentralisasi yang rendah dan rasio kemandirian yang belum optimal. Namun, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong cukup efektif, dan rasio efisiensi belanja dikategorikan efisien.

Penelitian kedua oleh Herry Indra Aruan (2017) yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011–2014” menemukan bahwa kinerja keuangan Kota Surabaya menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang baik, dengan rasio kemandirian dan desentralisasi fiskal yang meningkat setiap tahunnya.

Penelitian ketiga oleh Musfirotn (2024) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal” menyimpulkan bahwa PAD dan pendapatan pajak daerah Kabupaten Tegal mengalami peningkatan secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi keuangan daerah berada pada kategori baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal harmonisasi belanja.

Penelitian keempat oleh M. Rizki (2019) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi pada Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2008–2017” menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pola hubungan instruktif, dengan ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Rasio efektivitas PAD tergolong sangat efektif, namun rasio efisiensi masih kurang efisien.

Penelitian kelima oleh Putri Winalis Setia (2024) yang berjudul “Analisis Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016–2021” menemukan bahwa kinerja keuangan Provinsi Jawa Timur secara umum sudah baik, dengan rasio efektivitas PAD yang sangat efektif, efisiensi keuangan daerah yang cukup efisien, desentralisasi fiskal yang sangat baik, dan kemandirian keuangan daerah yang sangat tinggi.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Karya Ilmiah**

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada pendekatan, ruang lingkup analisis, dan konteks lokal yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2021–2023. Berbeda dengan lima penelitian terdahulu yang lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif atau hanya fokus pada satu indikator, penelitian ini menggabungkan empat indikator utama kinerja keuangan daerah secara menyeluruh, yaitu rasio efektivitas PAD, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio ketergantungan fiskal berdasarkan kerangka Mahmudi (2019).

Penelitian ini memperluas cakupan dengan menggambarkan faktor-faktor penghambat dan upaya konkret yang dilakukan pemerintah daerah, seperti peningkatan kapasitas SDM, reformasi pelayanan publik, serta strategi menggali potensi PAD melalui optimalisasi sektor pajak dan retribusi. Kebaruan ini tidak dijumpai secara eksplisit dalam penelitian Rizkiza Aurin (2023) yang lebih deskriptif, maupun dalam penelitian M. Rizki (2019) yang terbatas pada data statistik jangka panjang.

Selain itu, penelitian ini menyoroti hubungan antara kinerja keuangan dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik, sesuatu yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian Herry Aruan (2017) maupun Putri Winalis Setia (2024). Aspek ini menunjukkan bahwa efektivitas fiskal tidak hanya soal capaian angka, tetapi juga mencerminkan legitimasi dan akuntabilitas

pemerintah di mata masyarakat.

Penelitian ini juga dilakukan pada Kota Palu, sebuah daerah yang sebelumnya jarang menjadi fokus penelitian kinerja keuangan secara komprehensif, sehingga dapat memberikan perspektif baru terhadap tantangan dan peluang fiskal di daerah berkembang dengan kondisi geografis dan sosial yang khas.

Dengan demikian, kebaruan dari penelitian ini terletak pada kombinasi antara pendekatan multi-rasio yang menyeluruh, integrasi faktor sosial-organisasional, dan fokus geografis yang jarang dikaji, sehingga diharapkan dapat menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah yang lebih responsif dan berkelanjutan.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Kinerja keuangan dari Pemerintah Daerah Kota Palu anggaran Tahun 2021-2023. Faktor-faktor penghambat serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu anggaran Tahun 2021-2023.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Pranee Liamputtong dalam bukunya *Qualitative Research Methods* (2020), berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, perspektif, dan interaksi manusia dalam konteks sosial tertentu. Metode ini mencakup berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dengan cara yang lebih holistik. Selanjutnya menurut Fatimah (2019), pendekatan kualitatif lebih cenderung digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan masalah sosial karena dalam penelitian kualitatif, data dan proses penelitiannya lebih menekankan pada makna, konteks, dan interpretasi sosial.

Metode penelitian kualitatif, yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek yang alami dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggabungkan beberapa sumber melalui triangulasi, serta menganalisis data secara induktif dengan fokus pada makna daripada generalisasi (Nurdin & Hartati, 2019:42). Selanjutnya, menurut Bogdan dan Taylor (dalam Ruskarini, 2017:10), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Dengan menerapkan metode kualitatif pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis Keuangan Daerah Kota Palu Anggaran Tahun 2021-2023. Melalui metode ini, peneliti mengeksplorasi perspektif para pegawai yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami bagaimana beban kerja dialami oleh para PNS di Bappeda, hambatan-hambatan apa saja yang mereka hadapi, serta upaya yang dilakukan oleh instansi dalam mengatasi tantangan beban kerja tersebut.

Data yang dikumpulkan bersifat naratif dan mendalam guna menangkap makna dan konteks sosial yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Setiap penelitian kualitatif dalam pemerintahan dapat memiliki variasi dalam desainnya, karena disesuaikan dengan sifat alami dari penelitian kualitatif itu sendiri yang bersifat dinamis, di mana fenomena dapat muncul secara tiba-tiba sesuai dengan prinsip alami (Simangunsong, 2017:190).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sugiyono

(2016:225) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, seperti angket, wawancara, pengamatan, ujian, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait Analisis Keuangan Daerah Kota Palu Anggaran Tahun 2021-2023. Informan penelitian, seperti yang disampaikan oleh Moleong (2015:163), adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan individu yang benar-benar mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan selama 20 hari, yaitu dari tanggal 6 Januari 2025 hingga 25 Januari 2025.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Palu, peneliti menggunakan teori Analisis Rasio Keuangan Daerah (Mahmudi:2019) yang memiliki 4 dimensi yaitu:

1. Efektivitas PAD dengan indikatornya Target Penerimaan PAD dan Realisasi Penerimaan PAD.
2. Kemandirian Keuangan Daerah dengan indikatornya Total PAD dan Transfer Pusat, Provinsi, dan Pinjaman
3. Derajat Desentralisasi dengan indikatornya Total PAD dan Total Pendapatan Daerah
4. Ketergantungan Keuangan Daerah dengan indikatornya Total Pendapatan Transfer dan Total Pendapatan Daerah

#### **3.1 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2023**

Dimensi Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio ini menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sebagai cerminan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal di Kota Palu berada pada angka rata-rata sebesar 23,6%, yang termasuk dalam kategori sangat kurang. Hal ini menandakan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dari PAD sendiri masih terbatas, dan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah belum signifikan.

Dimensi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio ini mengukur sejauh mana Pemerintah Daerah mampu membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Berdasarkan hasil analisis, rasio kemandirian keuangan Kota Palu sebesar 31,6%, yang termasuk dalam kategori cukup dengan pola hubungan konsultatif. Artinya, kontribusi dari PAD sudah mulai menunjukkan tren positif, meskipun masih ada dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah.

Dimensi Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio efektivitas PAD mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang dianalisis, rasio efektivitas PAD Kota Palu mencapai 107,13%, yang berarti telah melebihi target yang ditetapkan dan masuk dalam kategori sangat efektif. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palu cukup berhasil dalam menggali dan mengelola potensi PAD, meskipun secara kontribusi terhadap total pendapatan masih rendah.

Dimensi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio ketergantungan menggambarkan sejauh mana Pemerintah Daerah bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Palu memiliki rasio ketergantungan sebesar 74,5%, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Artinya, sebagian besar kebutuhan pembiayaan daerah masih bergantung pada dana transfer, dan hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kota Palu belum sepenuhnya terwujud.

#### **3.2 Faktor-faktor Penghambat Kinerja Keuangan Daerah Kota Palu**

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Palu:

- a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi, kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Palu masih berada dalam kategori kurang efisien. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, terutama operator yang mampu mengoperasikan aplikasi sistem informasi keuangan yang dapat memudahkan dalam pengelolaan anggaran. masih terdapat kekurangan pada bagian kompetensi pegawai pemerintah daerah serta banyaknya pegawai yang bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki.

#### b. Potensi Daerah Yang Belum Tergali Dengan Baik

Dilihat dari hasil perhitungan tingkat kemandirian daerah, tingkat kemandirian Kota Palu masih tergolong sangat rendah, yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah belum memadai. Hal ini disebabkan oleh potensi daerah yang belum tergalai secara optimal serta kelalaian dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan. Selama tiga tahun terakhir, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu hanya satu kali tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Rendahnya capaian PAD menunjukkan adanya kendala dalam optimalisasi potensi lokal, seperti pajak dan retribusi daerah, yang seharusnya menjadi sumber utama pendapatan. Tingkat kinerja keuangan daerah pada dasarnya tergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang tinggi dan dominan akan berdampak pada tingkat kinerja keuangan yang juga akan terus meningkat dan sebaliknya apabila PAD tergolong rendah maka kinerja keuangan daerah yang dimiliki juga tidak akan maksimal dan masuk dalam kategori rendah. Sehingga diperlukan upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD masing-masing agar memiliki kinerja keuangan yang baik. Khususnya kepada pihak yang bertanggungjawab dalam pemungutan PAD tersebut, yang dalam hal tersebut BPKAD diberikan kewenangan untuk melakukannya.

#### c. Pelayanan Publik

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa kinerja keuangan bukan hanya tanggung jawab dari BPKAD sendiri namun merupakan tanggung jawab dari seluruh stakeholders pemerintah daerah Kota Palu. Hasil penghitungan rasio pertumbuhan selama tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja, dan pendapatan transfer di Kota Palu. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, yang berdampak pada tingkat penerimaan daerah. Selain itu, kualitas pelayanan publik oleh pegawai pemerintah juga berkontribusi pada menurunnya kepercayaan masyarakat. Faktor utama yang menghambat peningkatan kinerja keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sumber daya manusia yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Namun, meskipun ada tantangan tersebut, penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palu menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahun, terlihat dari terus meningkatnya PAD. Selain itu, Kota Palu juga berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sudah cukup baik. Meskipun demikian, peningkatan kinerja keuangan masih perlu terus ditingkatkan.

### 3.3 Upaya Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja

keuangan daerah Kota Palu:

a. Meningkatkan Kompetensi Pegawai

Berdasarkan pengamatan peneliti, kompetensi pegawai sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Palu. Oleh karena itu Pemerintah Kota Palu berupaya meningkatkan kompetensi pegawai dengan memberikan fasilitas dan dukungan kepada pegawai BPKAD yang berminat mengikuti pendidikan atau pelatihan terkait pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan di bidangnya juga didukung penuh. Diharapkan hasil dari pelatihan dan pendidikan ini dapat diaplikasikan di lingkungan kerja, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja keuangan daerah Kota Palu.

b. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kota Palu dapat dilakukan dengan menggali potensi daerah yang belum tergali, khususnya dalam sektor pajak dan retribusi yang selama ini menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah perlu memperbaiki kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menyesuaikan peraturan yang mendukung peningkatan PAD, serta mencari sumber-sumber pendapatan baru tanpa menunggu ketetapan dari pemerintah provinsi atau pusat. Upaya ini penting agar anggaran yang dialokasikan dalam APBD benar-benar memberikan dampak signifikan bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Wewenang yang diberikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memberikan fleksibilitas bagi BPKAD dan pemerintah daerah Kota Palu untuk menentukan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diterima melalui penetapan target penerimaan. Besar kecilnya PAD Kota Palu sangat ditentukan oleh upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Upaya tersebut mencakup bagaimana sumber-sumber PAD dapat ditingkatkan, baik dari kapasitas maupun jumlah potensi daerah yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan. Penambahan sumber-sumber penerimaan daerah harus dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, memastikan tidak ada potensi yang terabaikan dan dikelola dengan baik. Selanjutnya, BPKAD perlu secara cermat mencari peluang baru untuk meningkatkan PAD dengan strategi yang tepat, agar realisasi penerimaan PAD dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Pemerintah daerah Kota Palu sebagai pengelola kekayaan daerah dengan mengelola penerimaan daerahnya terus melakukan upaya dalam mendorong peningkatan dalam pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Palu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan fasilitas umum untuk mendorong kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak agar membayar pajak tepat waktu. Langkah ini bertujuan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD. Dengan peningkatan layanan dan fasilitas, diharapkan tercipta daerah dengan kinerja keuangan yang lebih baik, sebagaimana terlihat dari berbagai program seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mempermudah akses layanan masyarakat.

### 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2021–2023 tergolong kurang optimal dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hal

ini terlihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal yang rendah (23,6%), rasio kemandirian keuangan yang masih pada kategori cukup (31,6%), dan rasio ketergantungan keuangan yang sangat tinggi (74,5%). Di sisi lain, rasio efektivitas PAD mencapai 107,13%, yang menunjukkan bahwa target PAD dapat tercapai bahkan melebihi target.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Rizkiza Aurin (2023) di Kota Jambi, yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, meskipun efektivitas PAD sudah tergolong baik. Kedua daerah sama-sama menghadapi tantangan dalam meningkatkan kontribusi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah.

Herry Indra Aruan (2017) dalam penelitiannya di Kota Surabaya menemukan tren positif dari peningkatan efektivitas dan efisiensi APBD disertai kenaikan rasio kemandirian dan desentralisasi fiskal setiap tahun. Hal ini berbeda dengan Kota Palu yang justru masih menunjukkan stagnasi dan fluktuasi dalam rasio-rasio tersebut, meskipun ada capaian opini WTP.

Sementara itu, Musfirotun (2024) yang meneliti Kabupaten Tegal juga menemukan bahwa efektivitas dan efisiensi keuangan daerah cukup baik, meskipun masih ada ruang perbaikan dari sisi perencanaan dan realisasi anggaran. Temuan ini menguatkan hasil penelitian di Palu yang juga menyoroti kelemahan dalam tahap perencanaan dan potensi lokal yang belum tergali optimal.

M. Rizki (2019) dalam penelitiannya di Kabupaten Pandeglang menyimpulkan bahwa meski efektivitas PAD tergolong sangat efektif, kemandirian keuangan masih rendah dan memiliki pola hubungan instruktif. Hal ini identik dengan kondisi Kota Palu, yang juga masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat.

Putri Winalis Setia (2024) mencatat bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki rasio keuangan yang sangat baik, terutama pada indikator efektivitas PAD dan derajat desentralisasi fiskal. Ini kontras dengan Kota Palu yang meskipun berhasil mencapai efektivitas PAD yang tinggi, tetapi masih sangat lemah dalam indikator desentralisasi dan kemandirian.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan-temuan terdahulu bahwa keberhasilan dalam mencapai target PAD belum tentu sejalan dengan peningkatan kemandirian dan kapasitas fiskal daerah. Kota Palu perlu lebih fokus pada peningkatan potensi lokal, penguatan kapasitas SDM, serta strategi fiskal yang lebih terukur untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara nyata.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan penulis di lapangan selama masa penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Hasil analisis berdasarkan empat indikator pengukuran rasio keuangan daerah, yaitu rasio efektivitas, rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi, dan rasio ketergantungan secara keseluruhan menunjukkan bahwa kondisi Kota alu masih berada dalam kategori rendah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Faktor-faktor yang Menghambat keuangan Kota Palu adalah sebagai berikut: Kurangnya kualitas pegawai, Efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlihat dari kurangnya upaya pemerintah daerah dalam menggali potensi yang ada serta kelalaian dalam perencanaan pengelolaan keuangan dan Pelayanan publik yang kurang optimal ditunjukkan oleh fluktuasi dalam pertumbuhan PAD, belanja, dan pendapatan transfer, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, yang berdampak pada tingkat penerimaan daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan adalah sebagai berikut: Mendorong dan memfasilitasi pegawai di lingkungan pemerintah daerah melalui pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan atau studi lanjut untuk meningkatkan kompetensi pegawai di Badan Keuangan dan Aset

Daerah, Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban untuk meningkatkan penerimaan daerah dan mempercepat realisasi anggaran serta Meningkatkan pelayanan publik untuk mendorong kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, sehingga penerimaan daerah dapat terus meningkat dan digunakan untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan di satu instansi pemerintahan saja yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu sebagai model studi kasus yang dipilih.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2023 untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aruan, H. I. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011–2014. Skripsi, Universitas Airlangga. <https://repository.unair.ac.id/60436/>
- Aurin, R. (2023). Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019–2021. Skripsi, Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/49172/>
- Faguet, J.-P. (2014). Decentralization and governance. *World Development*, 53, 2–13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002>
- Fatimah, Y. (2019). Peranan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penempatan Pejabat Struktural di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal MSDA*, 7(2), 103–125. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMSDA/article/view/1149>
- Liamputtong, P. (2020). *Qualitative Research Methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Mahmudi, M. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Edisi Ketiga, Upp Stim Ykpn, Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musfirotun. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Skripsi, Politeknik Harapan Bersama. Tersedia di: <https://eprints.poltektegal.ac.id/4440/>
- Nurdin, N., & Hartati, S. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Rizki, M. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi pada Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2008–2017. Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia. Tersedia di: <https://repository.upi.edu/40277/>
- Rodríguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2010). Does decentralization matter for regional disparities A cross-country analysis. *Journal of Economic Geography*, 10(5), 619–644. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbp049>
- Ruskarini, M. (2017). Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan dan Aplikasi. Yogyakarta: Deepublish.
- Setia, P. W. (2024). Analisis Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016–2021. Skripsi, Universitas Bojonegoro. Tersedia di: <https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/79/>
- Simangunsong, F. M. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Smoke, P. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform. *Public Administration and Development*, 35(2), 97–112. <https://doi.org/10.1002/pad.1703>
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.